

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas ridho dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, tepat pada waktunya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam mengoperasionalkan seluruh program/kegiatan dalam rangka pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Provinsi Jawa Barat.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Dan Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	16
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	25
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	46
BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	51
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah.....	51
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	52
3.3. Program dan Kegiatan.....	53
BAB IV PENUTUP.....	78
Lampiran-lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat masing-masing mengacu pada RPJMD dan RKPD Provinsi Jawa Barat.

Renja merupakan hal yang sangat penting, karena akan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pada tahun yang berjalan.

Tahun 2017 merupakan rencana tahun ke empat dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat, dimana penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018, sedangkan penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2017, oleh karena itu tingkat keberhasilan dari rencana penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2017 yang merupakan bagian dari rencana



penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi, akan turut mewarnai hasil dari keseluruhan proses pembangunan pada periode sebelumnya, dengan kata lain tingkat keberhasilan dari rencana tahun 2017 akan berdampak pada penentuan keberhasilan dari pemerintahan Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat selama periode 2013-2018.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan integrasi seluruh pemangku kepentingan, maka rencana pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan pendekatan sektoral dan kewilayahan dengan melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan di Jawa Barat. Melalui proses perencanaan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, telah melahirkan Perjanjian Kerjasama antara Gubernur dengan Bupati/Walikota se Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Kegiatan Sektoral dan Kewilayahan, sehingga dapat dilakukan kerjasama dan pembagian peran yang proporsional antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana teruang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan. Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrument visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.



1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);



15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
27. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam melakukan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Barat, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.



b. Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah meningkatkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.

1.4. SISTEMATIKA DAN PENULISAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Dokumen Renja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD



3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan, Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2015. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, maka sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran *Common Goals* 1 Peningkatan Kualitas Pendidikan, diantaranya adalah meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan bagi pencari dan tenaga kerja dan sasaran *Common Goals* 3 Peningkatan Daya Beli Masyarakat, diantaranya meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kesempatan kerja. Maka program/kegiatan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dapat disajikan pada Tabel 2.1 dibawah ini.

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2016
PROVINSI JAWA BARAT

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun 2016 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
						Target Renja OPD tahun 2015 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2015 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2016 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
1 1.14	URUSAN WAJIB BIDANG KETENAGAKERJAAN											
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0,56	0,47	0,53	0,38	71,70	0,53	1,38	246,43	
		Prosentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Persen	3,48	3,94	3,77	2,78	73,74	3,93	10,65	306,03	
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	LPK	161	33	25	45	180,00	30	108,00	67,08	
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Persen	88,97	85,17	86,69	75,79	87,43	87,45	248,41	279	
		Jumlah wirausaha baru	Orang	6.000	570	1.850	3.380	182,70	1.000	4950,00	82,50	
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Prosentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Persen	75	50	60	94	156,67	65	209,00	278,67	



KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Rentra OPD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2013 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun 2016 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
						Target Renja OPD tahun 2015 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2015 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2016 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		Prosentase penurunan jumlah kecelakaan kerja	Persen	31,45	9,07	9,97	28,35	284,35	19,14	56,56	179,84	
		Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Lembaga	675	50	100	101	101,00	125	276,00	40,89	
		Prosentase penyelesaian kasus TKI-B	Persen	35	10	20	72,99	364,95	25	107,99	308,54	
		Prosentase kenaikan UMK	Persen	5	5	5	14,79	295,80	5	24,79	495,80	
2 2.08 4	URUSAN PILIHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN Program Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	KK	1.280	423	150	309	206,00	180	912	71,25	

Bandung, Juni 2016
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Untuk tahun 2015 diperoleh hasil capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sebesar **(182,15%)**. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikategorikan Sebagai Dinas yang berhasil dalam pencapaian kinerjanya.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik, Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak memenuhi target kinerja, hasil/keluaran yang telah direncanakan pada tahun 2015, dalam hal ini ada beberapa Indikator Kinerja Program (outcome) yang tidak memenuhi target diantaranya adalah persentase pencari kerja yang terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi, persentase pencari kerja yang terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan dan Persentase serapan tenaga kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier.
- b. Realisasi Indikator Kinerja Program (outcome) yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 diantaranya Jumlah LPK yang terakreditasi, Jumlah wirausaha baru, Persentase penyelesaian kasus hubungan industrial, Persentase penurunan jumlah kecelakaan kerja, Jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur, Persentase penyelesaian kasus TKI-B, Persentase kenaikan UMK, Jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan.
- c. Indikator yang tercapai dengan baik dan sangat baik disebabkan oleh perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan konsisten.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan target erat kaitannya dengan perencanaan anggaran karena volume output yang dikeluarkan tergantung dari seberapa banyak anggaran yang tersedia. Beberapa indikator yang tercapai melebihi target juga disebabkan karena “tidak terganggu” oleh pemotongan anggaran. Sarana hubungan industrial yang aktif juga memerlukan sumber daya manusia yang memadai khususnya pegawai Fungsional Mediator dan Pengawas Ketenagakerjaan.

- d. Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pelatihan bagi pencari kerja dan penciptaan kesempatan kerja antara lain:
 - 1. Menyusun konsep pelatihan bagi pencari kerja yang efektif bersama dengan stakeholders dan menuangkannya dalam rencana kerja formal; dan
 - 2. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang punya keterkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Jawa Barat

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-1)	Tahun 2016 (thn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-1)	Tahun 2016 (thn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%		160	416	464	512	160	416	464	512	
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	60%		1.320	2.940	3.420	3.340	1.320	3.436	3.420	3.340	
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%		1.180	1.850	2.100	2.250	1.180	3.370	2.100	2.250	
4	Besaran pencari kerja yang terdaftar	70%		450.000	480.000	483.000	487.000	450.000	420.000	483.000	487.000	



NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-1)	Tahun 2016 (thn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	Tahun 2014 (thn n-2)	Tahun 2015 (thn n-1)	Tahun 2016 (thn n)	Tahun 2017 (thn n+1)	
	yang ditempatkan											

5	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	50%		55	60	65	70	55	46,81	65	70	
6	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	50%		50	50	50	50	50	83,60	50	50	
7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%		2.925	2.455	1.985	1.515	2.925	1.355	1.985	1.515	
	Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%		2.925	2.455	1.985	1.515	2.925	1.385	1.985	1.515	



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat terdapat permasalahan yang sangat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan secara umum sebagai berikut :

1. Kualitas tenaga kerja masih rendah

Fakta ini dapat dilihat dari komposisi angkatan kerja di Jawa Barat menurut tingkat pendidikan. Terlihat dari data pada Tabel 2.5, bahwa penduduk yang bekerja didominasi oleh mereka yang hanya berpendidikan SD ke bawah (44,04%). Proporsi terbesar kedua adalah mereka yang memiliki pendidikan sekolah menengah, baik umum maupun kejuruan (sekitar 26,81%). Hal yang menarik adalah ternyata yang bekerja dengan pendidikan Diploma I keatas hanya sekitar 11,47 persen saja dari total pekerja.

2. Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi didominasi oleh yang berpendidikan SMP dan SMA. TPT untuk tamatan SD ke bawah hanya 4,91 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 TPT pada tingkat SD ke bawah, SMA Kejuruan, dan Diploma ke atas meningkat, sedangkan pada tingkat pendidikan SMP dan SMA Umum mengalami penurunan.

TABEL 2.3
Penduduk Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan, Agustus 2015

Pendidikan	Bekerja	Pengangguran	Total	TPT (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<= SD	8.276.632 (44,04 %)	427.631 (25,01 %)	8.704.263 (47,19 %)	4,91
SMP	3.322.370 (17,68 %)	405.268 (25,34 %)	3.727.638 (17,73 %)	10,87
SMA Umum	3.062.758 (16,30 %)	425.879 (26,24 %)	3.488.637 (16,19 %)	12,21
SMA Kejuruan	1.974.158 (10,51 %)	398.682 (18,58 %)	2.372.840 (10,34 %)	16,80
Diploma I/II/III	589.604 (3,14 %)	48.456 (1,86 %)	638.060 (2,54 %)	7,59
Universitas	1.565.960 (8,33 %)	88.958 (2,97 %)	1.654.918 (6,01 %)	5,38
Total	18.791.482 (100,00 %)	1.794.874 (100,00 %)	20.586.356 (100,00 %)	8,45

Sumber: Sakemas 2015

3. Persebaran tenaga kerja tidak merata

Pada Tahun 2015 penduduk Jawa Barat yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan daerah tidak merata persebarannya. Penduduk yang bekerja di perkotaan sebanyak 13.674.440 orang, lebih banyak dibandingkan di perdesaan yang hanya 5.117.042 orang dari jumlah 18.791.482 penduduk yang bekerja

TABEL 2.4
PENDUDUK YANG BEKERJA DI JAWA BARAT
MENURUT KABUPATEN/KOTA

NO.	KAB./KOTA	PERKOTAAN	PERDESAAN
1	Bogor	1.802.808	280.426
2	Sukabumi	449.560	462.712
3	Cianjur	350.175	513.417
4	Bandung	1.313.973	124.392
5	Garut	479.674	466.094
6	Tasikmalaya	234.206	490.458
7	Ciamis	186.321	307.757

NO.	KAB./KOTA	PERKOTAAN	PERDESAAN
8	Kuningan	216.428	219.284
9	Cirebon	702.735	111.089
10	Majalengka	298.548	282.181
11	Sumedang	222.603	258.426
12	Indramayu	346.886	330.315
13	Subang	252.082	381.034
14	Purwakarta	223.186	148.357
15	Karawang	613.415	260.580
16	Bekasi	1.180.994	163.827
17	Bandung Barat	394.719	168.533
18	Kab. Pangandaran	65.493	126.898
19	Kota Bogor	400.983	-
20	Kota Sukabumi	133.746	-
21	Kota Bandung	1.084.989	-
22	Kota Cirebon	126.821	-
23	Kota Bekasi	1.081.936	-
24	Kota Depok	896.981	-
25	Kota Cimahi	257.105	-
26	Kota Tasikmalaya	296.247	5.159
27	Kota Banjar	61.826	16.103
	Total	13.674.440	5.117.042

Sumber: BPS, 2015 diolah Pusdatinaker

4. Rendahnya akses terhadap kesempatan kerja

Lowongan pekerjaan seharusnya tersedia di setiap dinas yang membidangi ketenagakerjaan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Laport Lowongan Pekerjaan di Perusahaan. Namun pada kenyataannya informasi pasar kerja masih belum secara kontinu diperbaharui oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota.

5. Produktivitas tenaga kerja masih rendah

Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Barat masih tergolong rendah, dipicu tingkat kualitas kompetensi yang belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Secara makro tingkat produktivitas tenaga kerja di Jabar masih relatif rendah. Kesempatan kerja yang tersedia belum mampu dimanfaatkan sepenuhnya oleh pencari kerja karena keterampilan dan kompetensi yang dianggap belum sesuai.

Sektor yang paling rendah tingkat produktivitasnya terdapat pada industri padat karya, dimana banyak menyerap tenaga kerja dari lulusan SMA. Kondisi ini membuat industri menjadi lebih berat karena tidak mampu mengejar kapasitas produksi sehingga daya saing menjadi rendah dibanding produk impor.

6. Hubungan industrial belum kondusif

Sepanjang tahun 2015 tercatat jumlah kasus perselisihan hubungan industrial sebanyak 415 kasus dan melibatkan 6.604 orang tenaga kerja.

TABEL 2.5
DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2015

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PHI				
		KASUS	TENAGA KERJA	PB	ANJURAN	SISA
1	PROVINSI JAWA BARAT	1	180	1	0	0
2	KOTA BANDUNG	21	2611	7	12	2
3	KABUPATEN BANDUNG	13	1553	1	10	2
4	KOTA CIMAHI	36	38	4	27	5
5	KABUPATEN BANDUNG BARAT	2	6	0	2	0
6	KABUPATEN SUMEDANG	6	6	1	2	3
7	KABUPATEN CIANJUR	10	10	0	9	1
8	KABUPATEN SUKABUMI	37	101	0	21	16
9	KOTA SUKABUMI	5	0	0	5	0
10	KABUPATEN BOGOR	13	13	0	1	12
11	KOTA BOGOR	4	4	0	3	1
12	KOTA DEPOK	8	8	0	5	3

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PHI				
		KASUS	TENAGA KERJA	PB	ANJURAN	SISA
13	KOTA BEKASI	7	7	7	0	0
14	KABUPATEN BEKASI	125	278	125	0	0
15	KABUPATEN KARAWANG	35	1303	0	32	3
16	KABUPATEN PURWAKARTA	2	2	0	1	0
17	KABUPATEN SUBANG	22	402	0	22	0
18	KABUPATEN INDRAMAYU	19	19	2	6	11
19	KABUPATEN CIREBON	1	1	1	0	0
20	KOTA CIREBON	4	4	0	4	0
21	KABUPATEN KUNINGAN	0	0	0	0	0
22	KABUPATEN MAJALENGKA	11	11	2	6	3
23	KABUPATEN CIAMIS	0	0	0	0	0
24	KOTA BANJAR	10	10	3	7	0
25	KABUPATEN TASIKMALAYA	4	4	0	2	2
26	KOTA TASIKMALAYA	17	17	0	17	0
27	KABUPATEN GARUT	2	16	0	2	0
		415	6604	154	196	64

7. Kesejahteraan pekerja/buruh masih rendah

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 D dan Pasal 27 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. Tetapi dalam kenyataannya, meskipun telah memasuki pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tingkat kesejahteraan pekerja dan buruh di Indonesia tetap saja masih rendah.

Hasil survei menemukan bahwa bahwa Kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja lajang sebesar Rp 2.889.933,7. Lalu KHL untuk yang berkeluarga belum mempunyai anak adalah sebesar Rp 3.645.171. Sedangkan, yang berkeluarga mempunyai anak satu adalah sebesar Rp 4.807.969, berkeluarga mempunyai anak dua sebesar Rp 5.941.831.

Sementara proporsi pengeluaran belanja terbesar pada Perumahan (39 %) yang terdiri dari sewa kamar (65%), Kompor gas dan

LPG (3,6%), dan listrik (11,7%). Selanjutnya pengeluaran Makanan dan Minuman (28 %) yang terdiri dari beras (18%) serta mi instan (10%), dan Transportasi (23 %).

Dari situ, kemudian menemukan temuan survei 60 item komponen KHL versi Permenakertrans, bahwa kebutuhan dasar riil pekerja belum tercukupi untuk lajang maupun berkeluarga.

Untuk mengatasi defisit, riset menemukan pekerja/buruh menyiasatinya dengan cara berhemat, berutang, dan mencari penghasilan tambahan.

Ditemukan juga bahwa upah minimum sektoral dan struktur skala upah belum sepenuhnya diterapkan sehingga terjadi ketimpangan upah dan sistem pengupahan yang tidak adil. (Sumber: <http://www.beritasatu.com/nasional/309082-hanya-terima-upah-minimum-hidup-buruh-jauh-dari-layak.html>).

8. Perlindungan tenaga kerja masih rendah

Salah satu indikasi bahwa pekerja/buruh masih merasakan rendahnya upaya perlindungan adalah masih tingginya angka kecelakaan kerja di Jawa Barat tahun 2015 terlihat datanya pada Tabel 2.9 berikut ini:

TABEL 2.9

**DATA KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
TAHUN 2015**

No	Kab. /Kota	Jml. Kasus		Akibat Kecelakaan Kerja			
		Kecelakaan Kerja	Penyakit Akibat Kerja	Sembuh	Sementara Tidak Mampu Kerja	Cacat	Meninggal Dunia
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Kota Depok	83	0	83	0	0	0
2	Kab. Bogor	0			0	0	0
3	Kota Bogor	20	0	8	12	0	0
4	Kab. Sukabumi	65	0	64	3	0	0
5	Kota Sukabumi	0			0	0	0
6	Kab. Cianjur	76	0	30	27	4	3
7	Kab. Bekasi	123	0	0	120	2	1
8	Kota Bekasi	0	0	0	0	0	0

9	Kab. Karawang	338	0	46	287	2	3
10	Kab. Purwakarta	107	0	99	4	0	4
11	Kab. Subang	79	0	79	1	5	2
12	Kab. Cirebon	63	0	54	6	1	2
13	Kota Cirebon	47	8	48	9	0	0
14	Kab. Indramayu	2	0	1	0	0	1
15	Kab. Majalengka	0	0	0	0	0	0
16	Kab. Kuningan	0	0	0	0	0	0
17	Kota Banjar	89	0	88	0	0	0
18	Kab. Ciamis	0	0	0	0	0	2
19	Kota Tasikmalaya						
20	Kab. Tasikmalaya	0	0	0	0	0	0
21	Kab. Garut	21	0	20	0	0	1
22	Kab. Sumedang	100	0	100	0	0	0
23	Kota Cimahi	295	0	57	0	1	1
24	Kab. Bandung	146	0	146	0	0	0
25	Kota Bandung	82	1	50	25	4	4
26	Kab. Bandung Brt	134	0	132	0	2	0
27	Kab. Pangandaran						
Prov. Jawa Barat		1870	9	1105	494	21	24

Selain itu, indikasi lain dari rendahnya perlindungan tenaga kerja adalah masih adanya pelanggaran ketenagakerjaan. Pada tahun 2015, data yang ada menunjukkan beberapa indikasi pelanggaran ketenagakerjaan antara lain : pelanggaran yang direkap berdasarkan laporan Permenakertrans RI No. 9 Tahun 2005 tercatat sebanyak 3.326 pelanggaran norma kerja yang dilakukan oleh 920 perusahaan; Perusahaan yang membayar upah di bawah ketentuan UMK tercatat sebanyak 480 kasus; Pelanggaran PP/PKB sebanyak 357 kasus;

9. Peluang untuk bekerja kembali terbatas

Dalam beberapa tahun ini, model perekrutan calon pegawai yang dilaksanakan oleh perusahaan banyak mencari *fresh graduates*. *Fresh graduates* dianggap relatif lebih mudah untuk dibentuk sesuai dengan budaya kerja perusahaan karena belum memiliki pengalaman bekerja di tempat lain. Di satu sisi hal ini berdampak positif untuk penyerapan angkatan kerja baru, tetapi di sisi lain mengurangi kesempatan bagi angkatan kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 9.256 orang yang mengalami PHK.

TABEL 2.10
KASUS PHK DI JAWA BARAT TAHUN 2015

NO	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	PHK				
		KASUS	TENAGA KERJA	PB	ANJURAN	SISA
1	PROVINSI JAWA BARAT	32	81	28	3	1
2	KOTA BANDUNG	81	411	37	44	0
3	KABUPATEN BANDUNG	45	644	18	24	3
4	KOTA CIMAHI	37	177	17	20	0
5	KABUPATEN BANDUNG BARAT	21	526	9	12	0
6	KABUPATEN SUMEDANG	15	85	10	5	0
7	KABUPATEN CIANJUR	14	15	5	9	0
8	KABUPATEN SUKABUMI	59	452	12	45	2
9	KOTA SUKABUMI	17	175	13	4	0
10	KABUPATEN BOGOR	116	444	64	52	0
11	KOTA BOGOR	20	137	11	8	1
12	KOTA DEPOK	80	496	35	10	35
13	KOTA BEKASI	62	151	35	27	0
14	KABUPATEN BEKASI	195	291	79	112	4
15	KABUPATEN KARAWANG	74	799	40	34	0
16	KABUPATEN PURWAKARTA	29	108	14	12	3
17	KABUPATEN SUBANG	21	1824	16	5	0
18	KABUPATEN INDRAMAYU	8	31	8	0	0
19	KABUPATEN CIREBON	26	71	19	6	1
20	KOTA CIREBON	7	22	7	0	0
21	KABUPATEN KUNINGAN	3	5	2	1	0
22	KABUPATEN MAJALENGKA	8	2161	7	1	0
23	KABUPATEN CIAMIS	3	3	3	0	0
24	KOTA BANJAR	6	12	3	3	0
25	KABUPATEN TASIKMALAYA	3	3	3	0	0
26	KOTA TASIKMALAYA	8	12	8	0	0
27	KABUPATEN GARUT	20	120	10	10	0
	Jumlah	1010	9256	513	447	50

10. Minat untuk berwirausaha setelah bekerja rendah

Data BPS pada bulan Agustus 2015 menyebutkan bahwa penduduk Jawa Barat yang bekerja dengan status sebagai buruh/karyawan merupakan komposisi tertinggi, yaitu sebanyak 8,69 juta orang (46,24%), diikuti berusaha sendiri sebesar 3,41 juta orang (18,15%), dan berusaha dibantu buruh tidak tetap merupakan proporsi terkecil dibandingkan status pekerja lainnya, yaitu hanya 633 ribu orang (3,37%). Sementara itu pekerja formal sebesar 9,32 juta orang (49,61%) dan informal 9,47 juta orang (50,39%).

11. Fasilitasi purna kerja terbatas

Sejalan dengan rendahnya minat berwirausaha purna kerja, fasilitasi bagi purna kerja juga masih terbatas. Berwirausaha bagi purna kerja perlu untuk difasilitasi, mengingat masih banyaknya purna kerja, baik yang berasal dari pekerja antar kerja lokal dan antar kerja antar daerah, maupun pekerja antar kerja antar negara yang perlu dibimbing agar mampu mandiri, khusus untuk Purna TKI pada tahun 2015 Dinas Tenaga Kerja memfasilitasi Pelatihan Purna TKI sebanyak 250 orang.

12. Alokasi target penempatan calon transmigran

Alokasi target penempatan calon transmigran ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang pada Tahun 2015 dialihkan pada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI. Penetapan target ini menjadi permasalahan bagi daerah pengirim, termasuk Jawa Barat. Setiap tahun alokasi target pengiriman berkurang. Pada tahun 2013 target pengiriman yang diterima oleh Jawa Barat sebanyak 435 kepala keluarga (KK), kemudian berkurang menjadi 108 KK pada tahun 2014. Tahun 2015 alokasi target kembali berkurang menjadi hanya 260 KK. Sementara animo masyarakat untuk bertransmigrasi sangat tinggi dan selalu bertambah setiap tahun.

13. Ketidaksesuaian antara keterampilan dasar calon transmigran dengan kebutuhan daerah penempatan

Kurangnya informasi antara pusat dengan daerah menyebabkan calon transmigran menghadapi kondisi yang sulit. Kesulitan calon transmigran dalam menghadapi perbedaan karakteristik fisik daerah

penempatan dengan daerah asal calon transmigran, sehingga calon transmigran harus mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan karakter daerah yang akan ditempatinya nanti. Penetapan daerah penempatan transmigran saat ini masih menjadi kewenangan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI, sedangkan pelatihan calon transmigran dapat diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi ketransmigrasian.

14. Manajemen penyelenggaraan transmigrasi dalam bentuk Kerja Sama Antar Daerah sulit diimplementasikan

Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) dimaksudkan untuk sinkronisasi pelaksanaan ketransmigrasian antara daerah pengirim dengan daerah penempatan. Pada kenyataannya KSAD ini sulit untuk ditindaklanjuti pasca-penempatan transmigran. Hal ini disebabkan oleh penetapan target penempatan masih menjadi kewenangan Kementerian terkait.

15. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan masyarakat transmigrasi lokal (*resettlement*) dalam menumbuhkembangkan jiwa wirausaha

Rendahnya kemampuan dan keterampilan warga translok karena lebih dari 5.000 Kepala Keluarga (KK) masyarakat translok di 21 UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) di 11 Kabupaten se-Jawa Barat hidup dengan penghasilan yang sangat rendah, tingkat pendidikan yang relatif rendah (hanya sampai dengan sekolah dasar), sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai serta akses menuju lokasi *resettlement* yang sulit dijangkau. Keterlibatan OPD lain dalam pembinaan pengembangan translok untuk menjadi Desa Produktif

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Disnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan arahan kepala Daerah Terkait prioritas program, kegiatan dan pagu indikatif yang

disediakan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.11
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
29	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
1	Pengelolaan Penyusunan Buletin Ketenagakerjaan dan Ketranmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1200 eksemplar/ 3 orang pengelola	200.000.000	Pengelolaan Penyusunan Buletin Ketenagakerjaan dan Ketranmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1200 eksemplar/3 orang pengelola	180.000.000	1500 eksemplar/ 3 orang pengelola	198.000.000	
2	Publikasi Ketenagakerjaan dan Ketranmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	50.000.000	Publikasi Ketenagakerjaan dan Ketranmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
3	Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketranmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	2 Kali	50.000.000	Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketranmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	2 Kali	50.000.000	2 Kali	55.000.000	
4	Forum OPD	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	200.000.000	Forum OPD	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	165.000.000	
5	Monitoring dan Evaluasi RTKP	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi RTKP	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
6	Pengelola Teknis Jaringan Disnakertrans	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	90.000.000	Pengelola Teknis Jaringan Disnakertrans	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	90.000.000	1 Kegiatan	99.000.000	
7	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disnakertrans	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disnakertrans	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	175.000.000	1 Kegiatan	192.500.000	
8	Perencanaan Program dan kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bekasi	1 Kegiatan	150.000.000	Perencanaan Program dan kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bekasi	1 Kegiatan	150.000.000	1 Kegiatan	165.000.000	
9	Pembinaan Alumni Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bekasi	2 Kegiatan/60 orang	100.000.000	Pembinaan Alumni Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bekasi	2 Kegiatan/60 orang	100.000.000	2 Kegiatan/60 orang	110.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
10	Rapat Koordinasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	25.000.000	Rapat Koordinasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	27.500.000	
11	Rapat stakeholder Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	25.000.000	Rapat stakeholder Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	27.500.000	
12	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	75.000.000	1 Kegiatan	82.500.000	
13	Temu Konsolidasi Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	100 Orang	200.000.000	Temu Konsolidasi Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	100 Orang	175.000.000	100 Orang	192.500.000	
14	Penganugerahan Purna TKI	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	90 orang	400.000.000	Penganugerahan Purna TKI	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	90 orang	400.000.000	90 orang	440.000.000	
15	Evaluasi Pasca Pelatihan Calon tenaga kerja luar negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	2 Angkatan/40 Orang	100.000.000	Evaluasi Pasca Pelatihan Calon tenaga kerja luar negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	2 Angkatan/40 Orang	100.000.000	2 Angkatan/40 Orang	110.000.000	
16	Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Keg	100.000.000	Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Keg	75.000.000	1 Keg	82.500.000	
39	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja							
17	Pelatihan Alih Profesi Bidang Jasa (Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Majalengka	7 Angkatan/140 Orang	470.250.000	Pelatihan Alih Profesi Bidang Jasa (Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Majalengka	7 Angkatan/140 Orang	470.000.000	7 Angkatan/140 Orang	517.000.000	
18	Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	1 Angkatan/25 Orang	164.870.000	Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	1 Angkatan/25 Orang	160.000.000	1 Angkatan/25 Orang	176.000.000	
19	Pemagangan ke Luar Negeri (Jepang)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	1 Angkatan/300 Orang	386.705.000	Pemagangan ke Luar Negeri (Jepang)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	1 Angkatan/300 Orang	380.000.000	1 Angkatan/300 Orang	418.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
20	Pemagangan Dalam Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	5 Angkatan/ 100 Orang	598.425.000	Pemagangan Dalam Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	5 Angkatan/ 100 Orang	590.000.000	5 Angkatan/ 100 Orang	649.000.000	
21	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	10 LPK	150.000.000	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	10 LPK	125.000.000	10 LPK	137.500.000	
22	Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi LPK	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	1 Angkatan/30 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi LPK	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	1 Angkatan/30 Orang	100.000.000	1 Angkatan/30 Orang	110.000.000	
23	Bimbingan Teknis Akreditasi	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	2 Angkatan/60 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Akreditasi	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	2 Angkatan/60 Orang	100.000.000	2 Angkatan/60 Orang	110.000.000	
24	Penganugerahan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Terbaik	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Bandung	1 paket	150.000.000	Penganugerahan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Terbaik	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Bandung	1 paket	150.000.000	1 paket	165.000.000	
25	Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Jawa Barat	49 Angkatan/ 980 Orang	3.400.000.000	Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Jawa Barat	49 Angkatan/ 980 Orang	3.000.000.000	49 Angkatan/ 980 Orang	3.300.000.000	
26	Diseminasi Sertifikasi Kompetensi Profesi	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	4 Angkatan/200 Orang	100.000.000	Diseminasi Sertifikasi Kompetensi Profesi	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	4 Angkatan/200 Orang	100.000.000	4 Angkatan/200 Orang	110.000.000	
27	Bimtek Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	2 Angkatan/30 Orang	400.000.000	Bimtek Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	2 Angkatan/30 Orang	300.000.000	2 Angkatan/30 Orang	330.000.000	
28	Bimtek Produktivitas 5 S	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	150.000.000	Bimtek Produktivitas 5 S	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	1 Angkatan/20 Orang	110.000.000	
29	Bimtek Training Need Analysis	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	Bimtek Training Need Analysis	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	1 Angkatan/20 Orang	110.000.000	
30	Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	1 Angkatan/20 Orang	110.000.000	
31	Pelatihan Pembentukan LSP	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	150.000.000	Pelatihan Pembentukan LSP	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	1 Angkatan/20 Orang	110.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
32	Pelatihan Asesor Kompetensi	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	150.000.000	Pelatihan Asesor Kompetensi	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	1 Angkatan/20 Orang	110.000.000	
33	Pelatihan Pembentukan TUK	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	150.000.000	Pelatihan Pembentukan TUK	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	1 Angkatan/20 Orang	110.000.000	
34	Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Silabi Pelatihan	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	1 Angkatan/25 Orang	150.000.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Silabi Pelatihan	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	1 Angkatan/25 Orang	100.000.000	1 Angkatan/25 Orang	110.000.000	
35	Workshop Jabar Mengembara	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	300 Orang/2 Lokasi	200.000.000	Workshop Jabar Mengembara	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	300 Orang/2 Lokasi	150.000.000	300 Orang/2 Lokasi	165.000.000	
36	Rekrutmen dan Seleksi Peserta Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	Rekrutmen dan Seleksi Peserta Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
37	Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	12 Angkatan/240 Orang	2.500.000.000	Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	12 Angkatan/240 Orang	2.500.000.000	12 Angkatan/240 Orang	2.750.000.000	
38	Pelatihan bagi keluarga TKI	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Bandung	3 Angkatan/60 Orang	200.000.000	Pelatihan bagi keluarga TKI	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Bandung	3 Angkatan/60 Orang	700.000.000	3 Angkatan/60 Orang	770.000.000	
39	Pemberian modal usaha bagi alumni Pelatihan bagi keluarga TKI			20 Orang	500.000.000	Pemberian modal usaha bagi alumni Pelatihan bagi keluarga TKI	-	-	-	-	-	-	-
40	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bekasi	192 Orang/9 Kejuruan	2.000.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bekasi	192 Orang/9 Kejuruan	1.920.000.000	192 Orang/9 Kejuruan	2.112.000.000	
41	Koordinasi, Identifikasi dan Rekrutment Peserta Pelatihan Kewirausahaan melalui Mobile Training Unit (MTU)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi, Identifikasi dan Rekrutment Peserta Pelatihan Kewirausahaan melalui Mobile Training Unit (MTU)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
42	Pelatihan Kewirausahaan melalui Mobile Training Unit (MTU)	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	6 Angkatan/180 Orang	900.000.000	Pelatihan Kewirausahaan melalui Mobile Training Unit (MTU)	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	6 Angkatan/180 Orang	900.000.000	6 Angkatan/180 Orang	990.000.000	
43	Koordinasi, Identifikasi dan Rekrutment Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi, Identifikasi dan Rekrutment Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
44	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Bandung	8 Angkatan/1 60 Orang	800.000.000	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Bandung	8 Angkatan/160 Orang	800.000.000	8 Angkatan/1 60 Orang	880.000.000	
45	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	5 Angkatan	100.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Meningkatkan jumlah wirausaha baru	Jawa Barat	5 Angkatan	575.000.000	5 Angkatan	632.500.000	
46	Pemberian modal usaha pada alumni Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri			160 orang	500.000.000	Pemberian modal usaha pada alumni Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	-	-	-	-	-	-	-
40	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan					Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
47	Work Shop Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kali	100.000.000	Work Shop Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	
48	Lokakarya Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kali	200.000.000	Lokakarya Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kali	175.000.000	1 Kali	192.500.000	
49	Rakorwil Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	5 Wilayah	5 Kegiatan	200.000.000	Rakorwil Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	5 Wilayah	5 Kegiatan	175.000.000	5 Kegiatan	192.500.000	
50	Rapat Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	8 Kali	100.000.000	Rapat Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	8 Kali	100.000.000	8 Kali	110.000.000	
51	Diseminasi Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kegiatan	200.000.000	Diseminasi Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kegiatan	175.000.000	1 Kegiatan	192.500.000	
52	Survey KHL	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	2 Kali	50.000.000	Survey KHL	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	2 Kali	50.000.000	2 Kali	55.000.000	
53	Monitoring THR	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	50.000.000	Monitoring THR	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
54	Fasilitasi dan Monitoring Penanggulangan Pelaksanaan Upah Minimum	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	Fasilitasi dan Monitoring Penanggulangan Pelaksanaan Upah Minimum	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
55	Sosialisasi BPJS	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kali	150.000.000	Sosialisasi BPJS	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kali	100.000.000	1 Kali	110.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
56	Pembinaan dan Monitoring BPJS	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27 Kab/Kota	1 Kegiatan	100.000.000	Pembinaan dan Monitoring BPJS	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27 Kab/Kota	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
57	Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan	Meningkatkan persentase kenaikan UMK	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan	Meningkatkan persentase kenaikan UMK	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
58	Sosialisasi Pelayanan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	4 Kab./Kota	4 Lokasi	200.000.000	Sosialisasi Pelayanan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	4 Kab./Kota	4 Lokasi	100.000.000	4 Lokasi	110.000.000	
59	Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan/200 Pengawas	200.000.000	Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan/200 Pengawas	100.000.000	1 Kegiatan/200 Pengawas	110.000.000	
60	Upacara Pencanangan Bulan K3	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	5 Wilayah	5 Wilayah/1000 Orang	100.000.000	Upacara Pencanangan Bulan K3	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	5 Wilayah	5 Wilayah/1000 Orang	100.000.000	5 Wilayah/1000 Orang	110.000.000	
61	Aksi Sosial dalam rangka Bulan K3	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	5 Wilayah	5 Wilayah/500 Orang	200.000.000	Aksi Sosial dalam rangka Bulan K3	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	5 Wilayah	5 Wilayah/500 Orang	100.000.000	5 Wilayah/500 Orang	110.000.000	
62	Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	5 Kali	63.122.500	Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	5 Kali	60.000.000	5 Kali	66.000.000	
63	Rapat Badan Pekerja LKS Tripartit	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab./Kota	8 Kali	40.800.000	Rapat Badan Pekerja LKS Tripartit	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab./Kota	8 Kali	40.000.000	8 Kali	44.000.000	
64	Dialog/Rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat Antar Lintas Instansi	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab./Kota	5 Kali	126.500.000	Dialog/Rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat Antar Lintas Instansi	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab./Kota	5 Kali	120.000.000	5 Kali	132.000.000	
65	Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	60 Perusahaan	90.000.000	Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	60 Perusahaan	90.000.000	60 Perusahaan	99.000.000	
66	Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	100.000.000	Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
67	Pemberian Anugerah LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	400.000.000	Pemberian Anugerah LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	
68	Bimtek Tatacara Pembuatan PP, PKB bagi Pekerja dan Pengusaha	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	100.000.000	Bimtek Tatacara Pembuatan PP, PKB bagi Pekerja dan Pengusaha	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
69	Bimtek Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Bandung	1 Angkatan/25 Orang	300.000.000	Bimtek Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Bandung	1 Angkatan/25 Orang	200.000.000	1 Angkatan/25 Orang	220.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
70	Konsolidasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Mediator HI	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	25 Orang	100.000.000	Konsolidasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Mediator HI	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	25 Orang	100.000.000	25 Orang	110.000.000	
71	Penyuluhan Sarana Hubungan Industrial	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	30 Perusahaan	100.000.000	Penyuluhan Sarana Hubungan Industrial	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	30 Perusahaan	100.000.000	30 Perusahaan	110.000.000	
41	Program Peningkatan Kesempatan Kerja					Program Peningkatan Kesempatan Kerja							
72	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (AKL) bidang keahlian garment	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	2 Angkatan/100 Orang	300.000.000	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (AKL) bidang keahlian garment	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	2 Angkatan/100 Orang	200.000.000	2 Angkatan/100 Orang	220.000.000	
73	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab./Kota	2 Angkatan/100 Orang	450.000.000	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab./Kota	2 Angkatan/100 Orang	400.000.000	2 Angkatan/100 Orang	440.000.000	
74	Jejaring dan Kerjasama serta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat ke Negara Asia Pasifik	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	3 Negara Asia Pasifik	3 Negara	500.000.000	Jejaring dan Kerjasama serta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat ke Negara Asia Pasifik	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	3 Negara Asia Pasifik	3 Negara	500.000.000	3 Negara	550.000.000	
75	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penatalaksana Rumah Tangga.	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab./Kota	60 Orang	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penatalaksana Rumah Tangga.	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab./Kota	60 Orang	175.000.000	60 Orang	192.500.000	
76	Bimtek Alih Teknologi dan Pengetahuan bagi Pendamping Tenaga Kerja Asing	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Angkatan/150 Orang	300.000.000	Bimtek Alih Teknologi dan Pengetahuan bagi Pendamping Tenaga Kerja Asing	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Angkatan/150 Orang	300.000.000	1 Angkatan/150 Orang	330.000.000	
77	Pengendalian dan Layanan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	250 Perusahaan	100.000.000	Pengendalian dan Layanan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	250 Perusahaan	100.000.000	250 Perusahaan	110.000.000	
78	Padat karya pemberdayaan lingkungan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	60 Lokasi/3300 Orang	3.000.000.000	Padat karya pemberdayaan lingkungan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	60 Lokasi/3300 Orang	3.000.000.000	60 Lokasi/3300 Orang	3.300.000.000	
79	Temu konsultasi kegiatan padat karya pemberdayaan lingkungan		Bandung	60 Orang	100.000.000	Temu konsultasi kegiatan padat karya pemberdayaan lingkungan		Bandung	60 Orang	100.000.000	60 Orang	110.000.000	
80	Pengentrian data serapan 2 jutaan kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer,	Bandung	1 Kegiatan	700.000.000	Pengentrian data serapan 2 jutaan kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer,	Bandung	1 Kegiatan	700.000.000	1 Kegiatan	770.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
		sekunder dan tersier					sekunder dan tersier						
81	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	10 Angkatan	100.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	10 Angkatan	100.000.000	10 Angkatan	110.000.000	
82	Bimbingan Teknis bagi pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Wilayah Jawa Barat	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Angkatan	100.000.000	Bimbingan Teknis bagi pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Wilayah Jawa Barat	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Angkatan	100.000.000	1 Angkatan	110.000.000	
83	Pendataan Informasi Pasar Kerja	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	100.000.000	Pendataan Informasi Pasar Kerja	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	100.000.000	27 Kab/Kota	110.000.000	
84	Layanan Antar Kerja dan Konseling	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	35 Kali	100.000.000	Layanan Antar Kerja dan Konseling	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	35 Kali	100.000.000	35 Kali	110.000.000	
85	Bursa Kerja	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	2 Lokasi	2 Lokasi	500.000.000	Bursa Kerja	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	2 Lokasi	2 Lokasi	400.000.000	2 Lokasi	440.000.000	
86	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Televisi	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	1 kali	30.000.000	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Televisi	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	1 kali	30.000.000	1 kali	33.000.000	
87	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Radio	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	2 kali	10.000.000	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Radio	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	2 kali	10.000.000	2 kali	11.000.000	
88	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Koran	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	2 kali	10.000.000	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Koran	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	2 kali	10.000.000	2 kali	11.000.000	
89	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Mobil Penyuluhan TKI	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	7 desa	70.000.000	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Mobil Penyuluhan TKI	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	7 desa	70.000.000	7 desa	77.000.000	
90	Pembinaan PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Jawa Barat	75 Orang	50.000.000	Pembinaan PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Jawa Barat	75 Orang	50.000.000	75 Orang	55.000.000	
91	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Bandung, DKI Jakarta	100 Orang	50.000.000	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Bandung, DKI Jakarta	100 Orang	50.000.000	100 Orang	55.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
92	Peningkatan Kapasitas Instruktur PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Bandung	20 Orang	50.000.000	Peningkatan Kapasitas Instruktur PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Bandung	20 Orang	50.000.000	20 Orang	55.000.000	
93	Rapat Satgas Pelayanan TKI Terpadu (4 bidang) dan Satgas TKI Non Prosedural	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	10 Kali	200.000.000	Rapat Satgas Pelayanan TKI Terpadu (4 bidang) dan Satgas TKI Non Prosedural	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	10 Kali	200.000.000	10 Kali	220.000.000	
94	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	350 Orang	200.000.000	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	350 Orang	192.500.000	350 Orang	211.750.000	
95	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui SMS Gateway	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	800 Orang	50.000.000	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui SMS Gateway	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	800 Orang	50.000.000	800 Orang	55.000.000	
96	Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat, Provinsi DKI/Banten , Batam/Kepr i, 1 Negara Penempatan	1 Kegiatan	50.000.000	Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat, Provinsi DKI/Banten, Batam/Kepr i, 1 Negara Penempatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
97	Pendataan TKI di Bandara	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	12 Bulan	100.000.000	Pendataan TKI di Bandara	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	12 Bulan	100.000.000	12 Bulan	110.000.000	
98	Rapat Stakeholder Pelayanan TKI Terpadu	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	Rapat Stakeholder Pelayanan TKI Terpadu	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
99	Perluasan lapangan kerja melalui padat karya infrastruktur pengerasan jalan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	20 lokasi/1100 orang	2.129.168.290	Perluasan lapangan kerja melalui padat karya infrastruktur pengerasan jalan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	20 lokasi/1100 orang	2.129.168.290	20 lokasi/1100 orang	2.342.085.119	
100	Pengasuhan anak berbasis masyarakat (PABM) bagi anak TKI	meningkatnya pelayanan TKI asal Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	350.000.000	Pengasuhan anak berbasis masyarakat (PABM) bagi anak TKI	meningkatnya pelayanan TKI asal Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	350.000.000	1 Kegiatan	385.000.000	
101	Jabar Tolak Kekerasan bagi keluarga TKI	meningkatnya pelayanan TKI asal Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	Jabar Tolak Kekerasan bagi keluarga TKI	meningkatnya pelayanan TKI asal Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	220.000.000	
59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur							



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
101	Pengadaan Perlengkapan olahraga Disnakertrans kegiatan POR Pemprov	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan olahraga Disnakertrans kegiatan POR Pemprov	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
102	Pengadaan Perlengkapan obat-obatan layanan gawat darurat Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	50.000.000	Pengadaan Perlengkapan obat-obatan layanan gawat darurat Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	55.000.000	
103	Penceramah dan Instruktur Senam Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	40.000.000	Penceramah dan Instruktur Senam Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	40.000.000	1 Tahun	44.000.000	
104	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
105	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
106	Kegiatan Outbound dan Bimbingan Teknis Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	Kegiatan Outbound dan Bimbingan Teknis Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	1 Kegiatan	220.000.000	
107	Kegiatan bimbingan mental (baca al-qur'an)	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	Kegiatan bimbingan mental (baca al-qur'an)	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
108	Pemenuhan kebutuhan Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	Pemenuhan kebutuhan Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
109	Bimtek Peningkatan Aparatur Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	Bimtek Peningkatan Aparatur Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
110	Penceramah dan instruktur senam BLTKLN	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	20.000.000	Penceramah dan instruktur senam BLTKLN	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	20.000.000	1 Kegiatan	22.000.000	
111	Belanja Pakaian Dinas Harian BLTKLN	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	Belanja Pakaian Dinas Harian BLTKLN	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
114	Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	70.000.000	Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	70.000.000	1 Tahun	77.000.000	
115	Peningkatan Motivasi Pegawai BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	10.000.000	Peningkatan Motivasi Pegawai BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	
116	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	9 Orang	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	9 Orang	10.000.000	9 Orang	11.000.000	
117	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	5 Paket	10.000.000	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	5 Paket	10.000.000	5 Paket	11.000.000	
60	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
118	Kelengkapan administrasi kantor Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	172.000.000	Kelengkapan administrasi kantor Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	172.000.000	1 Tahun	189.200.000	
119	Kebutuhan Jasa Kantor Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	1.002.200.000	Kebutuhan Jasa Kantor Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	1.002.200.000	1 Tahun	1.102.420.000	
120	Pengadaan Cetak dan Penggandaan Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	Pengadaan Cetak dan Penggandaan Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	1 Kegiatan	110.000.000	
121	Kegiatan Halal Bil Halal Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas	Bandung	1 Kegiatan	84.500.000	Kegiatan Halal Bil Halal Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas	Bandung	1 Kegiatan	84.500.000	1 Kegiatan	92.950.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
		pokok dan fungsinya					pokok dan fungsinya						
122	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	147.200.000	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	147.200.000	1 Tahun	161.920.000	
123	Koordinasi Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Jawa Barat	1 Tahun	374.004.400	Koordinasi Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Jawa Barat	1 Tahun	374.004.400	1 Tahun	411.404.840	
124	Bahan Habis Pakai BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	Bahan Habis Pakai BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
125	Jasa Kebutuhan Kantor BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	250.000.000	Jasa Kebutuhan Kantor BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	250.000.000	1 Kegiatan	275.000.000	
126	Cetak dan Penggandaan BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	Cetak dan Penggandaan BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
127	Mamin Rapat Rapat BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	Mamin Rapat Rapat BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
128	Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	110.000.000	Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	110.000.000	1 Kegiatan	121.000.000	
129	Belanja ATK Administrasi Perkantoran Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	32.000.000	Belanja ATK Administrasi Perkantoran Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	32.000.000	1 Kegiatan	35.200.000	
130	Belanja Jasa Kantor Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	121.920.000	Belanja Jasa Kantor Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	121.920.000	1 Kegiatan	134.112.000	
131	Belanja cetak dan pengadaan Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	32.892.500	Belanja cetak dan pengadaan Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	32.892.500	1 Kegiatan	36.181.750	
132	Makan dan Minuman rapat Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	16.800.000	Makan dan Minuman rapat Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	16.800.000	1 Kegiatan	18.480.000	
133	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	8.000.000	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	8.000.000	1 Kegiatan	8.800.000	
134	Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas	Bandung	1 Tahun	428.945.000	Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPT D yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas	Bandung	1 Tahun	428.945.000	1 Tahun	471.839.500	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
140	Belanja Modal Pengadaan Komputer BPTKI Terpadu	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Bandung	4 Unit	40.000.000	Belanja Modal Pengadaan Komputer BPTKI Terpadu	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Bandung	4 Unit	40.000.000	4 Unit	44.000.000	
141	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio BPTKI Terpadu	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Bandung	4 Unit	30.000.000	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio BPTKI Terpadu	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Bandung	4 Unit	30.000.000	4 Unit	33.000.000	
62	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur							
142	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Disnakertrans	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD	Bandung	1 Tahun	311.800.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Disnakertrans	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD	Bandung	1 Tahun	311.800.000	1 Tahun	342.980.000	
143	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	296.220.000	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	296.220.000	1 Tahun	325.842.000	
144	Pemeliharaan peralatan kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	197.540.000	Pemeliharaan peralatan kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	197.540.000	1 Tahun	217.294.000	
145	Keamanan kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	354.600.000	Keamanan kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	354.600.000	1 Tahun	390.060.000	
146	Pemeliharaan Ruang Kerja Kepala Dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	81.500.000	Pemeliharaan Ruang Kerja Kepala Dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	81.500.000	1 Kegiatan	89.650.000	
147	Pemeliharaan Gedung Ex PHI	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	76.840.000	Pemeliharaan Gedung Ex PHI	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	76.840.000	1 Kegiatan	84.524.000	
148	Pemeliharaan Jaringan LAN Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	96.500.000	Pemeliharaan Jaringan LAN Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	96.500.000	1 Kegiatan	106.150.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
149	Pemeliharaan Content GLIK	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	35.000.000	Pemeliharaan Content GLIK	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	35.000.000	1 Kegiatan	38.500.000	
150	Bahan Pakai Habis BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	70.000.000	Bahan Pakai Habis BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	70.000.000	1 Kegiatan	77.000.000	
151	Jasa Kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	400.000.000	Jasa Kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	440.000.000	
152	Perawatan Kendaraan Bermotor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	Perawatan Kendaraan Bermotor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
153	Cetak dan Penggandaan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	Cetak dan Penggandaan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	
154	Makan dan Minuman BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	14.000.000	Makan dan Minuman BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	14.000.000	1 Kegiatan	15.400.000	
155	Pakaian Kerja BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	Pakaian Kerja BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	
156	Pemeliharaan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	42.000.000	Pemeliharaan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	42.000.000	1 Kegiatan	46.200.000	
157	Jasa Konstruksi BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	14.000.000	Jasa Konstruksi BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	14.000.000	1 Kegiatan	15.400.000	
158	Belanja Bahan Pakai Habis BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	Belanja Bahan Pakai Habis BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	
159	Belanja Jasa Kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	300.000.000	Belanja Jasa Kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	300.000.000	1 Kegiatan	330.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
160	Pemeliharaan kendaraan Dinas BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	Pemeliharaan kendaraan Dinas BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	55.000.000	
161	Pakakain kerja lapangan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	Pakakain kerja lapangan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	1 Kegiatan	11.000.000	
162	Pemeliharaan fasilitas kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	40.000.000	Pemeliharaan fasilitas kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	44.000.000	
163	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	410.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Tahun	410.000.000	1 Tahun	451.000.000	
164	Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	74.330.000	Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	74.330.000	1 Kegiatan	81.763.000	
165	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	38.900.000	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	38.900.000	1 Kegiatan	42.790.000	
166	Pemeliharaan peralatan kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	4.000.000	Pemeliharaan peralatan kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	4.000.000	1 Kegiatan	4.400.000	
167	Keamanan kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	33.250.000	Keamanan kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD /UPTB	Bandung	1 Kegiatan	33.250.000	1 Kegiatan	36.575.000	
66	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas						
168	Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	61.582.310	Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	61.582.310	1 Kegiatan	67.740.541	
169	Pelaporan capaian kinerja Program/Kegiatan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	85.600.000	Pelaporan capaian kinerja Program/Kegiatan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	85.600.000	1 Kegiatan	94.160.000	
170	Pelaporan capaian kinerja keuangan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan		Pelaporan capaian kinerja keuangan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	95.200.000	1 Kegiatan	104.720.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
					95.200.000								
171	Pelaporan pemutakhiran asset Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	3.800.000	Pelaporan pemutakhiran asset Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	3.800.000	1 Kegiatan	4.180.000	
99	Pengembangan Transmigrasi					Pengembangan Transmigrasi							
172	Sosialisasi Program Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	26 Kab/Kota	12 Lokasi	150.000.000	Sosialisasi Program Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	26 Kab/Kota	12 Lokasi	120.000.000	12 Lokasi	132.000.000	
173	Penyusunan Database Ketransmigrasian	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	1 Kegiatan	150.000.000	Penyusunan Database Ketransmigrasian	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	1 Kegiatan	120.000.000	1 Kegiatan	132.000.000	
174	Rapat Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	1 Kali	100.000.000	Rapat Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	1 Kali	75.000.000	1 Kali	82.500.000	
175	Evaluasi Keberhasilan Transmigran	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	3 Provinsi	100.000.000	Evaluasi Keberhasilan Transmigran	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	3 Provinsi	75.000.000	3 Provinsi	82.500.000	
176	Koodinasi Antar Daerah Pengirim	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	1 Provinsi	3 Provinsi	100.000.000	Koodinasi Antar Daerah Pengirim	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	1 Provinsi	3 Provinsi	75.000.000	3 Provinsi	82.500.000	
177	Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	1 Provinsi	4 Provinsi	100.000.000	Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	1 Provinsi	4 Provinsi	75.000.000	4 Provinsi	82.500.000	
178	Pembinaan Supervisi ke 19 UPT	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	200.000.000	Pembinaan Supervisi ke 19 UPT	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	190.000.000	11 Kab/Kota	209.000.000	
179	Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	11 Lokasi/21 UPT	11 Lokasi/21 UPT	91.987.500	Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	11 Lokasi/21 UPT	11 Lokasi/21 UPT	90.000.000	11 Lokasi/21 UPT	99.000.000	
180	Persiapan Pemindahan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	25 Kab/Kota	25 Lokasi	90.260.000	Persiapan Pemindahan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	25 Kab/Kota	25 Lokasi	90.000.000	25 Lokasi	99.000.000	



NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				Jumlah	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018		Catatan Penting
	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	APBD Provinsi	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	
181	Mengembangkan Lahan Praktek (Demplot) Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Meningkatkan jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Kab. Bandung	1 Tahun	448.250.000	Mengembangkan Lahan Praktek (Demplot) Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Meningkatkan jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Kab. Bandung	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	440.000.000	
182	Pelatihan Calon Transmigran (Istri dan Anak)	Meningkatkan jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	2 Angkatan/50 Orang	430.925.000	Pelatihan Calon Transmigran (Istri dan Anak)	Meningkatkan jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	2 Angkatan/50 Orang	400.000.000	2 Angkatan/50 Orang	440.000.000	
JUMLAH					40.000.000.000					37.810.405.000		41.591.445.500	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

a. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- Meningkatkan sertifikasi tenaga kerja dalam menghadapi pasar global-MEA
- Meningkatkan pelatihan yang berdaya saing sehingga sumber daya manusia mudah mendapat pekerjaan sesuai bidangnya
- Membantu mendorong lembaga pelatihan untuk mencetak, melahirkan SDM, pencari kerja dari sisi kuantitas maupun kualitas sehingga memiliki daya saing
- Keberadaan Sarana Prasarana Lembaga Pelatihan Mendorong para lulusan lembaga pelatihan memiliki daya saing
- Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Swasta sebagai leading terdepan mencetak SDM pencari kerja yang berkualitas dan tidak semua Kabupaten kota peduli keberadaan BLKnya dengan mengalokasikan dan APBDnya.

b. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan

- Meningkatkan pemberdayaan upah pekerja dengan menetapkan upah minimum kabupaten.
- Pemberian penyuluhan syarat kerja, norma kerja untuk mempererat keharmonisan antara pekerja dan pengusaha sehingga memperkecil terjadinya perselisihan hubungan industrial seperti unjuk rasa dan mogok kerja.
- Meningkatkan Kesejahteraan pekerja dengan mengikuti program Jamsostek.
- Meningkatkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga tercapainya kondisi nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- Berkurangnya angka pelanggaran norma ketenagakerjaan
- Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen K3.

c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja

- Melaksanakan Penempatan tenaga kerja sesuai dengan minat dan bakat.
- Pemberian pelayanan informasi pasar kerja sehingga masyarakat mudah untuk mencari pekerjaan baik online dan manual
- Pemberian penyuluhan perlindungan tenaga kerja Indonesia Luar Negeri.
- Pemberian penyuluhan perlindungan tenaga kerja Indonesia Dalam Negeri.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.
- Perluasan kesempatan kerja melalui Padat Karya Produktif dan Wirausaha
- Melaksanakan Job Fair dalam rangka mempertemukan pencari kerja dan pengguna Tenaga Kerja.
- Melaksanakan Bimbingan Jabatan kepada anak-anak yang memasuki dunia kerja
- Melaksanakan seleksi dengan user dalam rangka penerimaan calon Tenaga Kerja
- Pembinaan kepada Lembaga/Perusahaan penyalur Tenaga Kerja. (PPTKIS,BKK dll)

d. Bidang Transmigrasi

- Memberikan peluang kepada penduduk miskin dan penganggur dalam memperoleh tempat tinggal
- Memberikan peluang kepada penduduk miskin dan penganggur dalam memperoleh usaha dan kesempatan kerja
- Penataan persebaran penduduk melalui Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) bidang transmigrasi
- Meningkatkan kualitas calon transmigrasi
- Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal
- Menumbuhkan perekonomian di Unit Permukiman Transmigrasi Lokal
- Mendorong Kemandirian Masyarakat Transmigrasi Lokal

e. UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi

- Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Tenaga Kerja yang kreatif

f. UPTD Balai Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri

- Meningkatkan kemampuan berbahasa dan budaya di tempat kerja

g. UPTD Balai Pelatihan Ketrasmigrasian dan Kewirausahaan

- Meningkatkan Calon Transmigran dan Transmigran Lokal yang berdaya Saing di Tempat yang Baru

h. UPTD Balai Pelayanan TKI Terpadu

- Meningkatkan pelayanan yang prima terhadap Tenaga Kerja di Dalam Maupun di Luar Negeri

Tabel 2.13
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.12.39	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Pembangunan Workshop Pelatihan	Kab. Bogor	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnakertrans Kab. Bogor
2	Pembangunan Workshop Pelatihan	Kab. Bandung	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnaker Kab. Bandung
3	Pengadaan Peralatan Pelatihan Keterampilan Kerja	Kab Cirebon	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakertrans Kab Cirebon
4	Pengadaaan Sarana Asrama Pelatihan	Kab Cirebon	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakertrans Kab Cirebon
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana BLK	Kab Kuningan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnaker Kab Kuningan
6	Pembangunan Workshop IT	Kab Purwakarta	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakersostrans Kab Purwakarta
7	Pembangunan Balai Latihan Kerja Cililin	Kab Bandung Barat	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnakertrans Kab Bandung Barat
8	Pembangunan UPTD LLK	Kab Subang	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakertrans Kab Subang
9	Pengadaan Sarana Prasarana UPTD LLK	Kab Subang	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakertrans Kab Subang
10	Pengadaan Sarana Prasarana UPTD BLK Kota Bogor	Kota Bogor	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakersostrans Kota Bogor



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
11	Pembangunan Kursus Latihan Kerja (KLK)	Kab Ciamis	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnakertrans Kab Ciamis
12	Pembangunan BLK	Kota Tasikmalaya	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnakertrans Kota Tasikmalaya
13	Lanjutan Pembangunan BLK	Kab. Indramayu	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnakertrans Kab. Indramayu
14	Pengadaan Sarana dan Prasana BLK	Kab. Sumedang	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Dinsosnaker Kab. Sumedang
15	Pembangunan Gedung Kantor Disnakertrans Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 unit	Disnakertrans Kab. Sukabumi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Isu Strategis bidang ketenagakerjaan yang dihadapi Jawa Barat meliputi (1) Rendahnya kualitas tenaga kerja; (2) Jumlah angkatan kerja jauh lebih tinggi dibanding dengan kesempatan kerja; (3) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata dan (4) Pengangguran. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Jawa Barat dapat dilihat dari tingkat pendidikan masih rendah. Hal ini akan berdampak pada rendahnya penerimaan pada lapangan pekerjaan dengan pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan menengah. Meningkatnya jumlah angkatan kerja (supply) baik yang mempunyai pengetahuan dan yang tidak terampil, yang tidak diimbangi oleh perluasan lapangan pekerjaan, membuat angka pengangguran di Jawa Barat masih cukup tinggi, sebesar 1,98 juta orang, walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 2,41% dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 2,03 juta orang. Permasalahan yang cukup miris adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan dalam negeri, apabila masalah pengangguran ini tidak ditangani, maka akan menimbulkan kemiskinan di masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat 2008-2013 merupakan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap penyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat dengan Visi “Tercapainya Masyarakat Jawa Barat Yang Mandiri Dinamis dan Sejahtera”. Selanjutnya untuk memantapkan pembangunan tahap ketiga, sebagai acuan bagi kepemimpinan berikutnya hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2013, maka disusun visi RPJMD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu: "Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"

Tujuan di dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian adalah meningkatkan kompetensi pencari kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, serta menciptakan karakter ketenagakerjaan luar negeri, sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja baik formal maupun informal dan mampu memenuhi tuntutan pasar kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Dengan mempertimbangkan isu strategis tersebut, maka yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017 dengan tema pembangunan *"Memantapkan Pembangunan menuju Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"* meliputi :

1. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan 10 (*sepuluh*) *Common Goals* yang telah ditetapkan, yaitu :
 - 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan, yang difokuskan pada meningkatnya kualitas pendidikan guna pencapaian AMH dan RLS melalui pelayanan pendidikan non formal dan formal dasar dan menengah diikuti dengan pendidikan luar biasa dan kemampuan baca tulis serta pengembangan pendidikan bertaraf internasional.
 - 2) Peningkatan Kualitas Kesehatan, yang difokuskan pada pelayanan kesehatan dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - 3) Peningkatan Daya Beli Masyarakat, yang difokuskan pada pengembangan aneka usaha yang bernilai tambah dan berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran melalui prinsip masyarakat bekerja.
 - 4) Kemandirian Pangan, yang difokuskan pada ketersediaan dan kecukupan aneka bahan pangan berbasis potensi lokal yang berkualitas dan berkesinambungan.
 - 5) Peningkatan Kinerja Aparatur, yang difokuskan pada meningkatkan profesionalisme aparatur dan kinerja pemerintahan

daerah yang didukung oleh kualitas dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal dalam kerangka satu data untuk pembangunan Jawa Barat.

- 6) Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur jalan, perhubungan, sumberdaya air dan irigasi serta pemukiman.
- 7) Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, yang difokuskan pada pengembangan energi alternatif dan listrik perdesaan, serta infrastruktur penyedia air baku.
- 8) Penanganan Bencana dan Pengendalian Lingkungan Hidup, yang difokuskan pada upaya pengurangan resiko bencana, percepatan penanganan korban manusia, penanggulangan akibat bencana serta pelestarian dan perluasan kawasan lindung.
- 9) Pembangunan Perdesaan, yang difokuskan pada meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan, kapasitas fiskal, infrastruktur dasar dan perekonomian perdesaan.
- 10) Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi Wisata, yang difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan nilai – nilai budaya lokal serta destinasi wisata untuk kemajuan pembangunan Jawa Barat.

3.3. Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian sasaran *Common Goals* tersebut, dibutuhkan sinergitas lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan serta antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. dimana program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama oleh seluruh OPD yang terlibat, berdasarkan prinsip *SMART PLANNING* (*Specific, Measurable, Achievable, Resources, Time*) dan dilaksanakan berdasarkan prinsip *SHEWHART Cycle* (*Plan, Do, Check, Action*).



Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, menetapkan program/kegiatan dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah dalam rangka pencapaian :

- a. *Common Goals 1* yaitu Peningkatan Kualitas Pendidikan, dengan salah satu sasarnya adalah penyelenggaraan pendidikan non formal paket A, B dan C plus kewirausahaan.

Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas dan pendidikan berbasis masyarakat

- b. *Common Goals 3* yaitu Peningkatan Daya Beli Masyarakat, dengan salah satu sasarnya adalah meningkatnya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan budaya masyarakat bekerjasama perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha UMKM.

2. Kegiatan yang dikelompokkan pada *Non Common Goals*, yaitu yang merupakan dukungan mendasar untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pemenuhan belanja tetap dan mengikat OPD, serta kegiatan yang bersifat sektoral atau rintisan.

Belanja Tetap yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana Belanja Tetap terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) dan Belanja Langsung meliputi :

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 4) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Tahun 2017, dalam rangka pencapaian sasaran *Common Goals* 1 tematik 2 dan sasaran *Common Goals* 3 tematik 1, serta dengan memperhatikan isu strategis kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan, adalah terdiri dari program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Provinsi Jawa Barat

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat

Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
					Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN Ketenagakerjaan & Ketransmigrasian							
	29			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah							
		1		Pengelolaan Penyusunan Buletin Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1200 eksemplar/3 orang pengelola	180.000.000	APBD	1500 eksemplar/3 orang pengelola	198.000.000
		2		Publikasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	50.000.000	APBD	1 Kegiatan	55.000.000
		3		Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	2 Kali	50.000.000	APBD	2 Kali	55.000.000
		4		Forum OPD	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	150.000.000	APBD	1 Kegiatan	165.000.000
		5		Monitoring dan Evaluasi RTKP	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD	1 Kegiatan	110.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			6	Pengelola Teknis Jaringan Disnakertrans	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	90.000.000	APBD		1 Kegiatan	99.000.000
			7	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Disnakertrans	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	175.000.000	APBD		1 Kegiatan	192.500.000
			8	Perencanaan Program dan kegiatan UPTD Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bekasi	1 Kegiatan	150.000.000	APBD		1 Kegiatan	165.000.000
			9	Pembinaan Alumni Pasca Pelatihan Berbasis Kompetensi	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bekasi	2 Kegiatan/60 orang	100.000.000	APBD		2 Kegiatan/60 orang	110.000.000
			10	Rapat Koordinasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	25.000.000	APBD		1 Kegiatan	27.500.000
			11	Rapat stakeholder Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	25.000.000	APBD		1 Kegiatan	27.500.000
			12	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	1 Kegiatan	75.000.000	APBD		1 Kegiatan	82.500.000
			13	Temu Konsolidasi Tenaga Kerja Luar Negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	100 Orang	175.000.000	APBD		100 Orang	192.500.000
			14	Penganugerahan Purna TKI	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Bandung	90 orang	400.000.000	APBD		90 orang	440.000.000
			15	Evaluasi Pasca Pelatihan Calon tenaga kerja luar negeri	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	2 Angkatan/40 Orang	100.000.000	APBD		2 Angkatan/40 Orang	110.000.000
			16	Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Tingkat kesesuaian rencana program pembangunan OPD Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	1 Keg	75.000.000	APBD		1 Keg	82.500.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		39		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja								
			17	Pelatihan Alih Profesi Bidang Jasa (Dampak Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Majalengka	7 Angkatan/140 Orang	470.000.000	APBD		7 Angkatan/140 Orang	517.000.000
			18	Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	1 Angkatan/25 Orang	160.000.000	APBD		1 Angkatan/25 Orang	176.000.000
			19	Pemagangan ke Luar Negeri (Jepang)	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	1 Angkatan/300 Orang	380.000.000	APBD		1 Angkatan/300 Orang	418.000.000
			20	Pemagangan Dalam Negeri	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Jawa Barat	5 Angkatan/ 100 Orang	590.000.000	APBD		5 Angkatan/ 100 Orang	649.000.000
			21	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	10 LPK	125.000.000	APBD		10 LPK	137.500.000
			22	Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi LPK	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	1 Angkatan/30 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/30 Orang	110.000.000
			23	Bimbingan Teknis Akreditasi	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Jawa Barat	2 Angkatan/60 Orang	100.000.000	APBD		2 Angkatan/60 Orang	110.000.000
			24	Penganugerahan kepada Lembaga Pelatihan Kerja Terbaik	Meningkatkan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang terakreditasi	Bandung	1 paket	150.000.000	APBD		1 paket	165.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			25	Uji Kompetensi Tenaga Kerja	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Jawa Barat	49 Angkatan/ 980 Orang	3.000.000.000	APBD		49 Angkatan/ 980 Orang	3.300.000.000
			26	Diseminasi Sertifikasi Kompetensi Profesi	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	4 Angkatan/200 Orang	100.000.000	APBD		4 Angkatan/200 Orang	110.000.000
			27	Bimtek Produktivitas Pengembangan Kewirausahaan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	2 Angkatan/30 Orang	300.000.000	APBD		2 Angkatan/30 Orang	330.000.000
			28	Bimtek Produktivitas 5 S	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/20 Orang	110.000.000
			29	Bimtek Training Need Analysis	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/20 Orang	110.000.000
			30	Bimbingan Teknis Pengukuran Produktivitas Perusahaan	Perwujudan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jawa Barat	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/20 Orang	110.000.000
			31	Pelatihan Pembentukan LSP	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/20 Orang	110.000.000
			32	Pelatihan Asesor Kompetensi	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/20 Orang	110.000.000
			33	Pelatihan Pembentukan TUK	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat kompetensi	Bandung	1 Angkatan/20 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/20 Orang	110.000.000
			34	Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Silabi Pelatihan	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	1 Angkatan/25 Orang	100.000.000	APBD		1 Angkatan/25 Orang	110.000.000
			35	Workshop Jabar Mengembara	Meningkatkan persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	300 Orang/2 Lokasi	150.000.000	APBD		300 Orang/2 Lokasi	165.000.000



Nomor	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
	36	Rekrutmen dan Seleksi Peserta Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
	37	Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri	Bandung	12 Angkatan/240 Orang	2.500.000.000	APBD		12 Angkatan/240 Orang	2.750.000.000
	38	Pelatihan bagi keluarga TKI	Bandung	3 Angkatan/60 Orang	700.000.000	APBD		3 Angkatan/60 Orang	770.000.000
	39	Pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Bekasi	192 Orang/9 Kejuruan	1.920.000.000	APBD		192 Orang/9 Kejuruan	2.112.000.000
	40	Koordinasi, Identifikasi dan Rekrutment Peserta Pelatihan Kewirausahaan melalui Mobile Training Unit (MTU)	Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
	41	Pelatihan Kewirausahaan melalui Mobile Training Unit (MTU)	Jawa Barat	6 Angkatan/180 Orang	900.000.000	APBD		6 Angkatan/180 Orang	990.000.000
	42	Koordinasi, Identifikasi dan Rekrutment Peserta Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
	43	Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Bandung	8 Angkatan/160 Orang	800.000.000	APBD		8 Angkatan/160 Orang	880.000.000
	44	Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minta Usaha Mandiri	Jawa Barat	5 Angkatan	575.000.000	APBD		5 Angkatan	632.500.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		40		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
			45	Work Shop Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kali	100.000.000	APBD		1 Kali	110.000.000
			46	Lokakarya Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kali	175.000.000	APBD		1 Kali	192.500.000
			47	Rakorwil Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	5 Wilayah	5 Kegiatan	175.000.000	APBD		5 Kegiatan	192.500.000
			48	Rapat Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	8 Kali	100.000.000	APBD		8 Kali	110.000.000
			49	Diseminasi Pengupahan	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Bandung	1 Kegiatan	175.000.000	APBD		1 Kegiatan	192.500.000
			50	Survey KHL	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	2 Kali	50.000.000	APBD		2 Kali	55.000.000
			51	Monitoring THR	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			52	Fasilitasi dan Monitoring Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
			53	Sosialisasi BPJS	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kali	100.000.000	APBD		1 Kali	110.000.000
			54	Pembinaan dan Monitoring BPJS	Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	27 Kab/Kota	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegitatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			55	Sosialisasi Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan	Meningkatkan persentase kenaikan UMK	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
			56	Sosialisasi Pelayanan Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	4 Kab./Kota	4 Lokasi	100.000.000	APBD		4 Lokasi	110.000.000
			57	Rapat Koordinasi Daerah Pengawasan Ketenagakerjaan	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	Kab/Kota di Jawa Barat	1 Kegiatan/200 Pengawas	100.000.000	APBD		1 Kegiatan/200 Pengawas	110.000.000
			58	Upacara Pencanangan Bulan K3	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	5 Wilayah	5 Wilayah/1000 Orang	100.000.000	APBD		5 Wilayah/1000 Orang	110.000.000
			59	Aksi Sosial dalam rangka Bulan K3	Meminimalisir persentase jumlah kecelakaan kerja	5 Wilayah	5 Wilayah/500 Orang	100.000.000	APBD		5 Wilayah/500 Orang	110.000.000
			60	Rapat Pleno LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	5 Kali	60.000.000	APBD		5 Kali	66.000.000
			61	Rapat Badan Pekerja LKS Tripartit	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab./Kota	8 Kali	40.000.000	APBD		8 Kali	44.000.000
			62	Dialog/Rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat Antar Lintas Instansi	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kab./Kota	5 Kali	120.000.000	APBD		5 Kali	132.000.000
			63	Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	60 Perusahaan	90.000.000	APBD		60 Perusahaan	99.000.000
			64	Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
			65	Pemberian Anugerah LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	400.000.000	APBD		1 Kegiatan	440.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			66	Bimtek Tatacara Pembuatan PP, PKB bagi Pekerja dan Pengusaha	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
			67	Bimtek Pembinaan, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Bandung	1 Angkatan/25 Orang	200.000.000	APBD		1 Angkatan/25 Orang	220.000.000
			68	Konsolidasi Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Mediator HI	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	25 Orang	100.000.000	APBD		25 Orang	110.000.000
			69	Penyuluhan Sarana Hubungan Industrial	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus hubungan industrial	Kab./Kota	30 Perusahaan	100.000.000	APBD		30 Perusahaan	110.000.000
		41		Program Peningkatan Kesempatan Kerja								
			67	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal (AKL) bidang keahlian garment	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	2 Angkatan/100 Orang	200.000.000	APBD		2 Angkatan/100 Orang	220.000.000
			68	Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab./Kota	2 Angkatan/100 Orang	400.000.000	APBD		2 Angkatan/100 Orang	440.000.000
			69	Jejaring dan Kerjasama serta Penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat ke Negara Asia Pasifik	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	3 Negara Asia Pasifik	3 Negara	500.000.000	APBD		3 Negara	550.000.000
			70	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Penatalaksana Rumah Tangga.	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab./Kota	60 Orang	175.000.000	APBD		60 Orang	192.500.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			71	Bimtek Alih Teknologi dan Pengetahuan bagi Pendamping Tenaga Kerja Asing	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Angkatan/150 Orang	300.000.000	APBD		1 Angkatan/150 Orang	330.000.000
			72	Pengendalian dan Layanan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	250 Perusahaan	100.000.000	APBD		250 Perusahaan	110.000.000
			73	Padat karya pemberdayaan lingkungan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	60 Lokasi/3300 Orang	3.000.000.000	APBD		60 Lokasi/3300 Orang	3.300.000.000
			74	Temu konsultasi kegiatan padat karya pemberdayaan lingkungan		Bandung	60 Orang	100.000.000	APBD		60 Orang	110.000.000
			75	Pengentrian data serapan 2 jutaan kesempatan kerja melalui sektor primer, sekunder dan tersier	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Kegiatan	700.000.000	APBD		1 Kegiatan	770.000.000
			76	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	10 Angkatan	100.000.000	APBD		10 Angkatan	110.000.000
			77	Bimbingan Teknis bagi pengurus Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di Wilayah Jawa Barat	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Bandung	1 Angkatan	100.000.000	APBD		1 Angkatan	110.000.000
			78	Pendataan Informasi Pasar Kerja	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	100.000.000	APBD		27 Kab/Kota	110.000.000
			79	Layanan Antar Kerja dan Konseling	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	35 Kali	100.000.000	APBD		35 Kali	110.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			80	Bursa Kerja	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	2 Lokasi	2 Lokasi	400.000.000	APBD		2 Lokasi	440.000.000
			81	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Televisi	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	1 kali	30.000.000	APBD		1 kali	33.000.000
			82	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Radio	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	11.000.000
			83	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Koran	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	2 kali	10.000.000	APBD		2 kali	11.000.000
			84	Penyebaran Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui Mobil Peyuluhan TKI	Meningkatnya persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	7 desa	70.000.000	APBD		7 desa	77.000.000
			85	Pembinaan PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Jawa Barat	75 Orang	50.000.000	APBD		75 Orang	55.000.000
			86	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Bandung, DKI Jakarta	100 Orang	50.000.000	APBD		100 Orang	55.000.000
			87	Peningkatan Kapasitas Instruktur PPTKIS	Meningkatkan jumlah PPTKIS yang beroperasi sesuai prosedur	Bandung	20 Orang	50.000.000	APBD		20 Orang	55.000.000
			88	Rapat Satgas Pelayanan TKI Terpadu (4 bidang) dan Satgas TKI Non Prosedural	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	10 Kali	200.000.000	APBD		10 Kali	220.000.000
			89	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	350 Orang	192.500.000	APBD		350 Orang	211.750.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			90	Diseminasi Informasi Penempatan dan Perlindungan TKI melalui SMS Gateway	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat	800 Orang	50.000.000	APBD		800 Orang	55.000.000
			91	Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI asal Jawa Barat	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Jawa Barat, Provinsi DKI/Banten, Batam/Kepri, 1 Negara Penempatan	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			92	Pendataan TKI di Bandara	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	12 Bulan	100.000.000	APBD		12 Bulan	110.000.000
			93	Rapat Stakeholder Pelayanan TKI Terpadu	Meningkatkan persentase penyelesaian kasus TKI-B	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			94	Perluasan lapangan kerja melalui padat karya infrastruktur pengerasan jalan	Meningkatkan Persentase Serapan Tenaga Kerja melalui sektor usaha primer, sekunder dan tersier	Jawa Barat	20 lokasi/1100 orang	2.129.168.290	APBD		20 lokasi/1100 orang	2.342.085.119
			95	Pengasuhan anak berbasis masyarakat (PABM) bagi anak TKI	meningkatnya pelayanan TKI asal Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	350.000.000	APBD		1 Kegiatan	385.000.000
			96	Jabar Tolak Kekerasan bagi keluarga TKI	meningkatnya pelayanan TKI asal Jawa Barat	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	APBD		1 Kegiatan	220.000.000
		59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur								



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			97	Pengadaan Perlengkapan olahraga Disnakertrans kegiatan POR Pemprov	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			98	Pengadaan Perlengkapan obat-obatan layanan gawat darurat Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	50.000.000	APBD		1 Tahun	55.000.000
			99	Penceramah dan Instruktur Senam Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	40.000.000	APBD		1 Tahun	44.000.000
			100	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
			101	Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Data Kepegawaian Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			102	Kegiatan Outbound dan Bimbingan Teknis Disnakertrans	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Jawa Barat	1 Kegiatan	200.000.000	APBD		1 Kegiatan	220.000.000
			103	Kegiatan bimbingan mental (baca al-qur'an)	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			104	Pemenuhan kebutuhan Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			105	Bimtek Peningkatan Aparatur Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			106	Penceramah dan instruktur senam BLTKLN	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	20.000.000	APBD		1 Kegiatan	22.000.000
			107	Belanja Pakaian Dinas Harian BLTKLN	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			108	Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Tahun	70.000.000	APBD		1 Tahun	77.000.000
			109	Peningkatan Motivasi Pegawai BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	11.000.000
			110	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	9 Orang	10.000.000	APBD		9 Orang	11.000.000
			111	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek BPTKI Terpadu	Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai standar Daerah	Bandung	5 Paket	10.000.000	APBD		5 Paket	11.000.000
		60		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
			112	Kelengkapan administrasi kantor Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	172.000.000	APBD		1 Tahun	189.200.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			113	Kebutuhan Jasa Kantor Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	1.002.200.000	APBD		1 Tahun	1.102.420.000
			114	Pengadaan Cetak dan Penggandaan Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	110.000.000
			115	Kegiatan Halal Bil Halal Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	84.500.000	APBD		1 Kegiatan	92.950.000
			116	Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Bulanan Disnakertrans	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	147.200.000	APBD		1 Tahun	161.920.000
			117	Koordinasi Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Jawa Barat	1 Tahun	374.004.400	APBD		1 Tahun	411.404.840
			118	Bahan Habis Pakai BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			119	Jasa Kebutuhan Kantor BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	250.000.000	APBD		1 Kegiatan	275.000.000
			120	Cetak dan Penggandaan BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			121	Mamin Rapat Rapat BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	11.000.000
			122	Perjalanan Dinas Koordinasi Kegiatan BPK Bekasi	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bekasi	1 Kegiatan	110.000.000	APBD		1 Kegiatan	121.000.000
			123	Belanja ATK Administrasi Perkantoran Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	32.000.000	APBD		1 Kegiatan	35.200.000
			124	Belanja Jasa Kantor Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	121.920.000	APBD		1 Kegiatan	134.112.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			125	Belanja cetak dan pengadaan Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	32.892.500	APBD		1 Kegiatan	36.181.750
			126	Makan dan Minuman rapat Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	16.800.000	APBD		1 Kegiatan	18.480.000
			127	Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	8.000.000	APBD		1 Kegiatan	8.800.000
			128	Melaksanakan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	428.945.000	APBD		1 Tahun	471.839.500
			129	Kelengkapan administrasi kantor BPTKI Terpadu	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	63.030.000	APBD		1 Tahun	69.333.000
			130	Kebutuhan Jasa Kantor BPTKI Terpadu	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Kegiatan	30.000.000	APBD		1 Kegiatan	33.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			131	Pengadaan Cetak dan Penggandaan BPTKI Terpadu	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	54.900.000	APBD		1 Tahun	60.390.000
			132	Pengadaan Mamin Rapat bulanan BPTKI Terpadu	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Bandung	1 Tahun	10.800.000	APBD		1 Tahun	11.880.000
			133	Koordinasi Kegiatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI	Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD yang terpenuhi kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya	Jawa Barat	1 Kegiatan	52.882.500	APBD		1 Kegiatan	58.170.750
		61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			133	Belanja Modal Pengadaan Komputer BPTKI Terpadu	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Bandung	4 Unit	40.000.000	APBD		4 Unit	44.000.000
			134	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio BPTKI Terpadu	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah	Bandung	4 Unit	30.000.000	APBD		4 Unit	33.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
		62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			135	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Disnakertrans	Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD	Bandung	1 Tahun	311.800.000	APBD		1 Tahun	342.980.000
			136	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Tahun	296.220.000	APBD		1 Tahun	325.842.000
			137	Pemeliharaan peralatan kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Tahun	197.540.000	APBD		1 Tahun	217.294.000
			138	Keamanan kantor Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Tahun	354.600.000	APBD		1 Tahun	390.060.000
			139	Pemeliharaan Ruang Kerja Kepala Dinas	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	81.500.000	APBD		1 Kegiatan	89.650.000
			140	Pemeliharaan Gedung Ex PHI	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	76.840.000	APBD		1 Kegiatan	84.524.000
			141	Pemeliharaan Jaringan LAN Disnakertrans	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	96.500.000	APBD		1 Kegiatan	106.150.000
			142	Pemeliharaan Content GLIK	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	35.000.000	APBD		1 Kegiatan	38.500.000
			143	Bahan Pakai Habis BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	70.000.000	APBD		1 Kegiatan	77.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			144	Jasa Kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	400.000.000	APBD		1 Kegiatan	440.000.000
			145	Perawatan Kendaraan Bermotor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			146	Cetak dan Penggandaan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	11.000.000
			147	Makan dan Minuman BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	14.000.000	APBD		1 Kegiatan	15.400.000
			148	Pakaian Kerja BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	11.000.000
			149	Pemeliharaan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	42.000.000	APBD		1 Kegiatan	46.200.000
			150	Jasa Konstruksi BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	14.000.000	APBD		1 Kegiatan	15.400.000
			151	Belanja Bahan Pakai Habis BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	11.000.000
			152	Belanja Jasa Kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	300.000.000	APBD		1 Kegiatan	330.000.000
			153	Pemeliharaan kendaraan Dinas BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	50.000.000	APBD		1 Kegiatan	55.000.000
			154	Pakakain kerja lapangan BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	10.000.000	APBD		1 Kegiatan	11.000.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			155	Pemeliharaan fasilitas kantor BPK Bekasi	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bekasi	1 Kegiatan	40.000.000	APBD		1 Kegiatan	44.000.000
			156	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Tahun	410.000.000	APBD		1 Tahun	451.000.000
			157	Pemeliharaan Kendaraan Dinas BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	74.330.000	APBD		1 Kegiatan	81.763.000
			158	Pemeliharaan Kebersihan Gedung Kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	38.900.000	APBD		1 Kegiatan	42.790.000
			159	Pemeliharaan peralatan kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	4.000.000	APBD		1 Kegiatan	4.400.000
			160	Keamanan kantor BPTKI Terpadu	Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB	Bandung	1 Kegiatan	33.250.000	APBD		1 Kegiatan	36.575.000
		66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Dinas							
			161	Perencanaan dan Penganggaran Program/Kegiatan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	61.582.310	APBD		1 Kegiatan	67.740.541
			162	Pelaporan capaian kinerja Program/Kegiatan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	85.600.000	APBD		1 Kegiatan	94.160.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			163	Pelaporan capaian kinerja keuangan Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	95.200.000	APBD		1 Kegiatan	104.720.000
			164	Pelaporan pemutakhiran asset Disnakertrans		Bandung	1 Kegiatan	3.800.000	APBD		1 Kegiatan	4.180.000
		99		Pengembangan Transmigrasi								
			165	Sosialisasi Program Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	26 Kab/Kota	12 Lokasi	120.000.000	APBD		12 Lokasi	132.000.000
			166	Penyusunan Database Ketransmigrasian	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	1 Kegiatan	120.000.000	APBD		1 Kegiatan	132.000.000
			167	Rapat Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	1 Kali	75.000.000	APBD		1 Kali	82.500.000
			168	Evaluasi Keberhasilan Transmigran	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	Bandung	3 Provinsi	75.000.000	APBD		3 Provinsi	82.500.000
			169	Koodinasi Antar Daerah Pengirim	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	1 Provinsi	3 Provinsi	75.000.000	APBD		3 Provinsi	82.500.000
			170	Tindak Lanjut Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Tindak Lanjut Kerjasama antar Provinsi dibidang Ketransmigrasian	1 Provinsi	4 Provinsi	75.000.000	APBD		4 Provinsi	82.500.000



Nomor				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
			171	Pembinaan Supervisi ke 19 UPT	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	190.000.000	APBD		11 Kab/Kota	209.000.000
			172	Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	11 Lokasi/21 UPT	11 Lokasi/21 UPT	90.000.000	APBD		11 Lokasi/21 UPT	99.000.000
			173	Persiapan Pemindahan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran, Masyarakat Kawasan Transmigrasi Lokal (Resettlement) dan Masyarakat Sekitar Yang dlatih	25 Kab/Kota	25 Lokasi	90.000.000	APBD		25 Lokasi	99.000.000
			174	Mengembangkan Lahan Praktek (Demplot) Pelatihan Ketransmigrasian dan Kewirausahaan	Meningkatkan jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Kab. Bandung	1 Tahun	400.000.000	APBD		1 Tahun	440.000.000
			175	Pelatihan Calon Transmigran (Istri dan Anak)	Meningkatkan jumlah calon transmigran yang memiliki sertifikat pelatihan	Bandung	2 Angkatan/50 Orang	400.000.000	APBD		2 Angkatan/50 Orang	440.000.000
								37.810.405.000				41.591.445.500



BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, yang memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, isu strategis rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian tahun 2017 dan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat merupakan dokumen perencanaan tahunan, dan sebagai acuan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.
2. Penyusunan Operasionalisasi pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2017.
3. Evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Program/kegiatan Tahun 2017.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Jawa Barat, di berbagai tingkatan pemerintahan maupun dengan stakeholders terkait.

Rencana Kerja Tahun 2017 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : Juni 2016

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001